

BAB III

EVALUASI PROGRAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018

BAB III atau bab Pembahasan, bab ini membahas hasil analisis yang didasarkan pada data-data yang didapatkan melalui wawancara dengan BPBD Banjarnegara dan studi pustaka berdasarkan dokumen Rencana Strategis BPBD Banjarnegara. Bab ini akan ditampilkan penemuan-penemuan mengenai evaluasi program mitigasi di Banjarnegara. Analisis yang dilakukan akan didasarkan pada teori evaluasi milik Dunn yang mengelompokkan indikator evaluasi kedalam 6 indikator seperti eektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaratan, responsivitas, dan ketepatangunaan. Keenam indikator ini akan diimpelentasikan dijelaskan secara lebih merinci berdasarkan program mitigasi tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara, dan penjelasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

3.1. Efektivitas

3.1.1. Adanya program mitigasi bencana tanah longsor

Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara memiliki program mitigasi bencana yang didasarkan pada peraturan daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara diselenggarakan berdaarkan kebutuhan dan keadan, program mitigasi bencana tanah longsor juga diperkuat dengana adanya Rencana Strategis BPBD

Kabupaten Banjarnegara. Apalagi pasca bencana tanah longsor Sijemblung pada tahun 2014 yang memakan korban mencapai 125 jiwa, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan mitigasi bencana tanah longsor melalui BPBD Banjarnegara. Berdasarkan wawancara di Kantor BPBD Banjarnegara pada tanggal 29 Januari 2019 yang dilakukan bersama Bapak Andri Sulisty, SOR selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana menerangkan bahwa

“BPBD Banjarnegara memiliki program mitigasi yang khusus untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor adalah penyusunan peta risiko bencana, sosialisas dan pemantauan daerah rawan bencana, dan pembentukan desa tangguh bencana atau DESTANA.”

Berikut akan dijelaskan mengenai program mitigasi atau upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara.

3.1.1.1 Sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana

Sosialisasi ini biasanya dilakukan di desa-desa yang menurut peta rawan bencana termasuk dalam daerah rawan bencana dan sekolahan-sekolahan yang dekat dengan lokasi rawan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai daerah rawan bencana yang dapat membahayakan kelangsungan hidup apabila tidak dilakukan tindakan khusus. Bentuk dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebuah sosialisasi mengenai informasi-informasi daerah rawan bencana dan hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana, BPBD Banjarnegara juga melakukan pengawasan daerah-daerah rawan bencana untuk dipantau perkembangan dari hasil sosialisasinya.

Gambar 3.1 Foto kegiatan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana



Sumber: <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/76606/perlu-desa-tangguh-bencana>

Peserta dari sosialisasi ini terdiri dari beberapa unsur masyarakat didesa tersebut, unsur masyarakat tersebut meliputi unsur perangkat desa, linmas, karangtaruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya. Jika ditotal peserta sosialisasi biasanya dihadiri oleh sekitar 35 peserta. Ke 35 peserta ini diharapkan mampu menerima materi dengan baik dan mampu

mempraktikkan materi dengan baik, kemudia menyalurkan kepada masyarakat setempat agar seluruh masyarakat dapat sama-sama tahu dan saling mengingatkan ketika ancama bencana datang. Sebetulnya BPBD Banjarnegara ketika melakukan sosialisasi dapat menghadirkan banyak peserta tetapi karena anggaran yang dimiliki oleh APBD hanya mencukupi untuk 35 peserta saja, maka peserta yang diundang hanya 35 peserta saja.

Kegiatan sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana menjadi kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana khususnya bencana tanah longsor, sebab melalui kegiatan ini masyarakat telah mampu melihat kemungkinan-kemungkinan bencana yang terjadi. Selain itu hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat menjadi lebih mengetahui mengenai daerah rawan bencana. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana juga mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana untuk berfikir ketika kemungkinan bencana datang.

3.1.1.2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Pembentukan desa tangguh bencana bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar dapat melakukan mitigasi bencana dan evakuasi mandiri apabila terjadi bencana secara mendadak. BPBD Banjarnegara berharap dengan dibuatnya desa tangguh bencana dapat membantu BPBD dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana khususnya bencana tanah longsor. Proses pembuatan desa tangguh bencana meliputi:

- a. Sosialisasi rawan bencana, proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai desa tangguh bencana agar masyarakat dapat menentukan langkah selanjutnya ketika terjadi kemungkinan bencana.
- b. Kemudian dibentuk forum pengurangan risiko bencana, forum ini biasanya terdiri dari beberapa organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat terhadap risiko bencana kepada pemerintah.
- c. Dibentuk tim siaga bencana, tim ini dibentuk sebagai pertolongan terakhir dalam upaya mitigasi bencana, karena ketika sebuah program mitigasi bencana masih belum menunjukkan hasil yang baik maka tim inilah yang akan bertindak untuk mengambil keputusan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana
- d. Dilakukan pelatihan, proses ini menjadi tahapan terakhir dalam pembentukan desa tangguh bencana, dalam proses ini biasanya tim yang sudah tergabung dalam desa tangguh bencana melakukan pelatihan sesuai dengan kelompok dan kebutuhannya masing-masing.

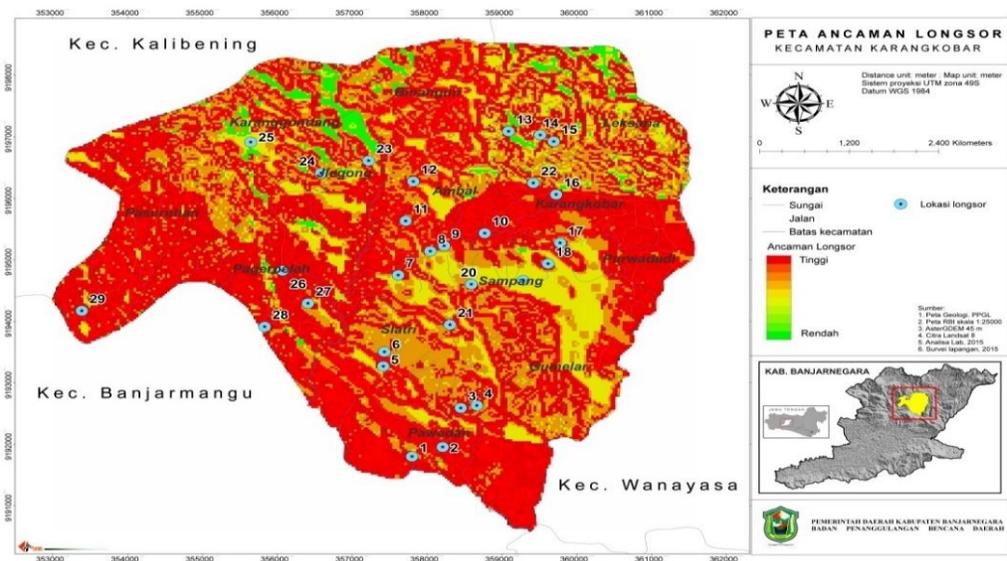
Setelah keempat tahapan dilakukan maka desa tersebut telah dinyatakan sebagai desa tangguh bencana.

3.1.1.3 Pembuatan Peta Risiko Bencana

Pembuatan peta risiko bencana didasarkan pada potensi kemungkinan kejadian bencana. Pembuatan peta risiko bencana ini bertujuan untuk memberikan data secara visual kepada siapa saja yang ini mencari data mengenai daerah yang memiliki potensi

bencana. BPBD Banjarnegara berupaya dapat pembaruan peta risiko bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara secara berkala. Tetapi karena keterbatasan biaya maka BPBD Banjarnegara belum pernah memperbarui peta risiko bencana yang dimiliki. Berdasarkan kebutuhannya, peta risiko bencana harus diperbarui selambat-lambatnya adalah 5 tahun sekali karena setiap tahunnya kondisi alam yang ada di Banjarnegara selalu berganti, bisa saja yang tadinya daerah tersebut merupakan daerah yang rawan bencana dengan tanda warna merah namun setelah 5 tahun kemudian sudah berkurang risikonya karena adanya program mitigasi bencana.

Gambar 3.2 Contoh Peta Potensi Bencana Tanah Longsor



Sumber: BPBD Banjarnegara

Dari gambar di atas dapat diartikan bahwa daerah yang berwarna merah adalah daerah dengan tingkat risiko bencana tanah longsor tinggi, sedangkan warna kuning menandakan bahwa daerah tersebut berada pada risiko bencana tanah longsor yang tidak

terlalu tinggi atau sedang, sedangkan daerah dengan warna hijau berada pada daerah yang memiliki risiko bencana bencana tanah longsor rendah.

3.1.2. Rancangan Waktu dalam Menjalankan Program

Program mitigasi bencana tanah longsor BPBD Banjarnegara tertuang dalam rencana Strategis BPBD Banjarnegara tahun 2017-2022 baik rencana waktu dan target pencapaiannya. Program mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara selalu bersifat berkelanjutan, artinya program mitigasi akan terus berlanjut dan berjalan walau telah ganti periode kepemimpinan baik pemimpin daerah maupun kepala BPBD, karena program mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD adalah program jangka panjang.

3.1.2.1. Waktu Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Sulistyono selaku kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan didapatkan hasil bahwa sampai dengan bulan Desember 2018 BPBD Banjarnegara telah melakukan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana sebanyak 41 kali, 38 sosialisasi dilakukan di desa-desa dan 3 sosialisasi dilakukan di sekolah. Program sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk tahun 2018 BPBD Banjarnegara melakukan sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana sebanyak 7 desa dan 1 sekolah.

Tabel 3.1 Daftar Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana Tahun 2018

| No | Uraian Kegiatan | Ancaman |
|----|-----------------|---------|
|----|-----------------|---------|

| | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1. | Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum | Longsor |
| 2. | Desa Majatengan Kecamatan Kalibening | Longsor |
| 3. | Desa Penanggungan Kecamatan Wanayasa | Longsor |
| 4. | SMK Negeri 1 Pejawaran | Longsor |
| 5. | Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur | Longsor |
| 6. | Desa Tegaljeruk Kecamatan Pagentan | Longsor |
| 7. | Desa Larangan Kecamatan Pagentan | Longsor |
| 8. | Desa Nagasari Kecamatan Pagentan | Longsor |

Sumber: BPBD Banjarnegara

Sosialisasi dilakukan sebulan sekali selama tahun 2018, sosialisasi hanya membutuhkan waktu satu hari saja. Sosialisasi dimulai pada pukul 08.00 dan selesai pada pukul 15.00. Sosialisasi dilakukan hanya sebulan sekali karena dalam kegiatan ini tidak hanya dilakukan sosialisasi saja melainkan dilakukan juga pengawasan daerah rawan bencana. Untuk pengawasan daerah rawan bencana dilakukan secara berkala sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Pengawasan ini dilakukan secara online dengan menanyakan kondisi disekitar daerah rawan bencana atau BPBD Banjarnegara datang langsung ke daerah rawan bencana untuk melihat kondisinya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dari segi waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana sudah cukup efektif karena waktu yang digunakan oleh BPBD Banjarnegara sudah cukup baik.

3.1.2.2. Waktu Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pembentukan desa tangguh bencana dilakukan berdasarkan rencana strategis yang telah disusun oleh BPBD Banjarnegara, waktu yang diperlukan dalam membuat sebuah desa tangguh bencana adalah 1 bulan terhitung dari kordinasi dan konsultasi sampai dengan pelaksanaan dan penetapan desa tangguh bencana. Daftar desa yang telah berhasil menjadi desa tangguh bencana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Lokasi Yang Telah Menjadi Desa Tangguh Bencana

| No. | Nama Desa | Nama Kecamatan | Ancaman |
|-----|--------------|----------------|---------|
| 1. | Sirongge | Pandanarum | Longsor |
| 2. | Plorengan | Kalibening | Longsor |
| 3. | Karangtengah | Wanayasa | Longsor |
| 4. | Sampang | Karangkobar | Longsor |
| 5. | Ratamba | Pejawaran | Longsor |
| 6. | Pejawaran | Pejawaran | Longsor |
| 7. | Paketan | Madukara | Longsor |
| 8. | Sopedang | Banjarmangu | Longsor |

| | | | |
|-----|---------------|------------|---------|
| 9. | Sawal | Sigaluh | Longsor |
| 10 | Kebutuhjurang | Pagedongan | Longsor |
| 11. | Bantar | Wanayasa | Longsor |
| 12. | Mlaya | Punggelan | Longsor |
| 13. | Tlaga | Punggelan | Longsor |
| 14. | Gimingsir | Pagentan | Longsor |
| 15. | Babadan | Pagentan | Longsor |
| 16. | Pesantren | Wanayasa | Longsor |
| 17. | Majasari | Pagentan | Longsor |
| 18. | Sokaraja | Pagentan | Longsor |
| 19. | Lawen | Pandanarum | Longsor |
| 20. | Pringamba | Pandanarum | Longsor |

Sumber: BPBD Banjarnegara

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling banyak memiliki desa tangguh bencana pada tahun 2018 adalah kecamatan Pagentan dengan jumlah 4 desa. Kecamatan yang paling sedikit memiliki desa tangguh bencana pada tahun 2018 adalah Kalibening, Karangobar, Banjarmangu, dan Sigaluh. Kegiatan pembentukan desa tangguh bencana dimulai dari bulan Januari 2018 dan berakhir pada bulan Desember 2018. Kegiatan ini dilakukan pada setiap bulannya dan terkadang satu bulan BPBD Banjarnegara dapat menyelesaikan pembentukan desa tangguh bencana. Keefektivas ini juga didukung dengan adanya praktek secara langsung setelah dilakukan pelatihan secara teori oleh instansi-instansi terkait yang membantu BPBD Banjarnegara dalam melakukan pembentukan desa tangguh bencana.

Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan yang efektif secara waktu, karena didalam rencana strategis BPBD Banjarnegara menargetkan 18 desa yang dapat disosialisasikan tetapi diakhir tahun 2018 BPBD Banjarnegara mampu melakukan 20 kali sosialisasi. Hal ini menjadi pembuktian bahwa BPBD Banjarnegara sangat mengupayakan agar program ini berjalan dengan baik dan maksimal. Tidak hanya direncanakan saja tetapi juga dilakukan.

3.1.2.3. Waktu Penyusunan Peta Risiko Bencana

Penyusunan atau pembuatan peta risiko bencana dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dilakukan berdasarkan kebutuhan ataupun keadaan suatu daerah, apabila daerah tersebut dirasa membutuhkan peta risiko bencana maka BPBD Banjarnegara akan membuat peta risiko bencana. BPBD Banjarnegara berencana akan menyusun peta risiko bencana sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara namun nyatanya peta risiko bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara hanya 14 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan peta risiko bencana ini dikerjakan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, di tahun 2018 BPBD Banjarnegara berhasil membuat peta risiko bencana sebanyak 2 peta yaitu peta risiko bencana di kecamatan Susukan dan kecamatan Purwanegara.

Pembuatan peta risiko membutuhkan waktu yang panjang karena disaat pembuatan peta tersebut dibutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Dari proses observasi lapangan untuk bahan data, sampai dengan proses

pembuatan sketsa dan pembuat bentuk peta sampai akhirnya sampai dengan proses pemberian warna sebagai tanda rawan atau tidak sebuah daerah terhadap resiko kejadian bencana.

Dalam hal pembuatan peta risiko bencana BPBD Banjarnegara untuk tahun 2018 dirasa kurang efektif hal ini disebabkan BPBD Banjarnegara pada tahun 2018 hanya berhasil membuat 2 peta risiko bencana saja, padahal terhitung pada tahun 2017 masih ada 8 kecamatan yang belum memiliki peta risiko bencana, dan seharusnya di tahun 2018 peta risiko bencana dapat dilengkapi menjadi 20 peta risiko bencana.

3.1.3. Adanya Penyesuaian Program dengan Sumber Anggaran

Sampai dengan tahun 2018 semua biaya kegiatan BPBD Banjarnegara dibebankan kepada APBD yang diberikan pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada BPBD Banjarnegara, selain itu BPBD Banjarnegara sesekali mendapatkan bantuan dari sponsor dalam menjalankan program bahkan anggota BPBD Banjarnegara tidak sungkan untuk melakukan iuran agar program yang dimiliki dapat berjalan dengan baik. Anggaran-anggaran yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara digunakan untuk menjalankan semua program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara, tidak hanya program mitigasi bencana saja melainkan semua program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara.

BPBD Banjarnegara selalu berupaya untuk mencukupi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program dengan cara mencari sponsor dan melakukan serkiler dengan sesame relawan bencana (serkiler adalah kata lain dari iuran). Dalam upayanya untuk membantu masyarakat dalam mengurangi resiko

bencana, BPBD Banjarnegara tidak pernah mematok harga apabila dimintai tolong oleh masyarakat sebagai pemateri dalam sosialisasi mitigasi bencana. Karena bagi BPBD Banjarnegara dengan masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan sosialisasi mitigasi bencana saja sudah cukup membantu BPBD Banjarnegara dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana. Tidak hanya diundang oleh warga masyarakat saja, biasanya BPBD Banjarnegara juga memenuhi undangan dari mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata di sekitar Banjarnegara, BPBD Banjarnegara selalu merasa senang ketika mendapatkan undangan untuk mengisis sosialisasi mengenai mitigasi bencana.

Dari pembahasan di atas maka telah dijelaskan bahwa BPBD Banjarnegara telah banyak melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana yang disebut sebagai rangkaian mitigasi, dan waktu yang digunakan oleh BPBD Banjarnegara selalu berpatokan dengan rencana kerja yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara. Menurut peneliti kegiatan pengurangan resiko bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara sudah cukup efektif, hal ini dilihat dari jumlah kegiatan dari BPBD Banjarnegara dan waktu yang digunakan untuk menjalankan program. Dari sekian banyak program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara keseluruhan program ini seluruhnya berjalan dan terlaksana. Namun ada beberapa yang harus diperbaiki seperti dalam hal pembuatan peta risiko bencana, yang seharusnya BPBD Banjarnegara memiliki 20 peta risiko bencana namun untuk sekarang BPBD Banjarnegara hanya memiliki 14 peta risiko bencana dari 20 kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Banjarnegara.

Selain itu pembaharuan kondisi peta risiko bencana juga penting karena ini dapat menjadi patokan dalam BPBD Banjarnegara melakukan program mitigasi bencana.

Selanjutnya dalam menjalankan program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana dilakukan pengawasan yang benar, dalam artian pengawasan juga dilakukan pada 35 warga yang terpilih untuk mengikuti sosialisasi saat memberikan sosialisasi atau melakukan tutor kepada warga yang lainnya, hal ini bertujuan agar ilmu dan materi yang diberikan oleh BPBD Banjarnegara kepada 35 warga pilihan secara substansi akan sama juga dengan 35 warga sampaikan kepada warga yang lainnya. Ketika mereka sudah memiliki pengetahuan yang sama maka akan dengan mudah BPBD Banjarnegara melakukan pemantauan kepada warga yang tinggal di daerah rawan bencana.

3.2. Efisiensi

3.2.1. Anggaran Khusus dari Pemerintah untuk BPBD Banjarnegara

Sumber anggaran yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara digunakan oleh BPBD Banjarnegara untuk menjalankan program. Semua rencana anggaran yang dikeluarkan oleh BPBD Banjarnegara telah tertera dalam rencana strategis BPBD Banjarnegara. Berikut akan dijelaskan anggaran yang digunakan oleh BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi bencana. Anggaran yang pertama adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana di tahun 2018 dilakukan di 5 kecamatan yaitu, kecamatan Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, Batur, Pagentan menghabiskan biaya dengan rincian dana sebesar Rp 49.971.500.00,- dari anggaran Rp

500.000.000.00,- anggaran sebesar itu habis digunakan untuk pembelian alat tulis dan pembiayaan akomodasi serta digunakan untuk membeli bahan sosialisasi. Anggaran yang kedua adalah anggaran yang digunakan BPBD Banjarnegara dalam melakukan kegiatan pembuatan desa tangguh bencana adalah sebesar Rp 323.249.000,- dari anggaran yang dimiliki sebesar Rp 325.000.000,- biaya ini digunakan untuk membeli keperluan yang dapat menunjang keberlangsungan acara. Anggaran yang ketiga adalah anggaran yang digunakan BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program pembuatan peta resiko dengan jumlah total anggaran yang dimiliki adalah sebesar Rp 200.000.000,- dan digunakan atau diserap sebesar Rp 195.868.000,-. Dalam anggaran tersebut terdapat efisiensi anggaran pada Honor PPHP dan penggaandaan peta resiko bencana. (LKJIP BPBD Banjarnegara th 2018)

Dari penjabaran penggunaan anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dapat dikatakan sudah efisien dalam bidang pendanaan. Karena dari dana yang dikeluarkan tidak terlalu jauh dengan anggaran yang telah direncanakan, walau tidak dapat diserap secara sempurna tetapi dana yang dikeluarkan sudah mendekati dengan anggaran yang direncanaan.

3.2.2. Sumber Daya Manusia atau Tenaga Profesional yang disediakan oleh BPBD

Banjarnegara

BPBD Banjarnegara tidak memiliki tenaga professional yang khusus menangani mitigasi bencana tanah longsor, karena BPBD Banjarnegara selalu bekerjasama dengan instansi terkait seperti SAR dan PMI dalam menjalankan

program mitigasi bencana tanah longsor. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Andri Sulistyono, SOR selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada wawancara tanggal 29 Januari 2019 di kantor BPBD Banjarnegara, beliau menerangkan bahwa

“BPBD Banjarnegara tidak memiliki tenaga profesional yang khusus menangani program mitigasi bencana tanah longsor dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara sangatlah kurang dan karena faktor anggaran yang tidak mencukupi apabila BPBD Banjarnegara mengangkat tenaga profesional yang khusus menangani program mitigasi bencana tanah longsor.”

Tenaga profesional atau tenaga ahli dapat dikatakan sebagai hal yang penting dalam mensukseskan program. BPBD Banjarnegara walaupun tidak memiliki tenaga profesional yang diproyeksikan untuk meneliti gerakan tanah dan menjalankan program kerja tetapi selalu mengupayakan untuk dapat mendeteksi pergerakan tanah agar dapat mengambil keputusan untuk melakukan mitigasi bencana. Tetapi BPBD Banjarnegara memiliki bidang yang khusus menangani kegiatan mitigasi bencana.

3.2.3. Pembangunan Fasilitas Khusus

Untuk memudahkan masyarakat dalam mendeteksi bencana maka BPBD Banjarnegara membuat fasilitas khusus untuk mendeteksi bencana yang bernama *early warning system/EWS*. Dalam wawancara bersama bapak Agus Haryono, S.Sos selaku Kasi Logistik dan Kedaruratan pada tanggal 6 Februari 2019 di Kantor BPBD Banjarnegara didapatkan hasil sebagai berikut:

“Tercatat BPBD Banjarnegara memiliki EWS sebanyak 11 buah dengan kondisi baik, jumlah ini sangatlah tidak ideal dengan jumlah titik rawan bencana tanah longsor yang terdapat pada 190 desa di kabupaten Banjarnegara, BPBD Banjarnegara mengungkapkan bahwa harga yang mahal menjadi alasan utama

mengapa BPBD tidak memiliki banyak EWS. Selain itu perawatan EWS juga tidak masuk dalam anggaran pemerintah.”

BPBD Banjarnegara berharap agar EWS yang telah dipasang di beberapa titik rawan bencana dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar, berikut adalah contoh gambar dari EWS.

Gambar 3.3 Gambar Early Warning System



Sumber: BPBD Banjarnegara

Selain membuat EWS, BPBD Banjarnegara juga melakukan upaya pembangunan fasilitas yang lain, salah satunya adalah pemasangan rambu tanda rawan bencana dan membuat tambleg atau semacam patok pembatas agar daerah tersebut jangan dilalui atau bahkan dihuni. Pemasangan jalur evakuasi juga

merupakan salah satu fasilitas pendukung yang dibangun oleh BPBD Banjarnegara dalam upaya untuk memberikan alur evakuasi mandiri yang dapat dilakukan oleh warga sekitar kejadian bencana tanah longsor. Dalam pemasangan fasilitas pendukung BPBD Banjarnegara dibantu oleh warga sekitar dan terkadang dibantu oleh dinas PU. Upaya-upaya dalam pembuatan fasilitas ini juga merupakan salah satu usaha BPBD Banjarnegara untuk menyadarkan dan memberitahukan kepada warga mengenai kondisi daerah tersebut.

Gambar 3.4 Gambar Rambu Tanda Rawan Bencana Tanah Longsor



Sumber: jateng.antaranews.com

BPBD Banjarnegara dalam pembangunan fasilitas pendukung, perlu adanya pengkonsepan yang lebih matang lagi dan perlu pertimbangan yang lebih lagi dalam membangun fasilitas pendukung. Selain itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan BPBD Banjarnegara terhadap fasilitas yang telah dibangun agar

fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa cara agar dapat memudahkan kinerja BPBD Banjarnegara dalam mengawasi fasilitas yang telah dibangun, yaitu dengan cara memberi pengertian mengenai fungsi dan tujuannya dibangun fasilitas tersebut kepada masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas tersebut, selain itu memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak merusak dan bahkan mengambil lalu menjual fasilitas tersebut menjadi salah satu cara yang baik dan efektif. Yang jelas harus tetap dipantau apa yang sudah dilakukan BPBD Banjarnegara agar program mitigasi dapat berjalan dengan efisien. Jauh dari itu semua, ini juga dapat dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara agar tidak mengeluarkan anggaran kembali untuk membeli fasilitas ini kembali dan agar lebih efisien.

3.3. Kecukupan

3.3.1. Hasil dari Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Dari setiap program yang dibuat oleh BPBD Banjarnegara selalu memiliki rencana hasil dan realisasi hasil dari program. Hasil dari mitigasi bencana tanah longsor oleh masyarakat sudah mulai terasa seperti yang diungkapkan oleh saudara Aufa Nazarudin salah seorang warga kecamatan Karangobar, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 mendapatkan hasil sebagai berikut:

“Program mitigasi bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara saya rasa saya sudah dapat merasakannya. Pertama sejak sosialisasi masalah daerah rawan bencana, saya menjadi lebih waspada dan selalu melihat kemungkinan-kemungkinan bencana tanah longsor yang ada. Terus lagi pembentukan desa tangguh bencana saya rasa kita menjadi lebih paham tentang hal-hal yang dapat kita lakukan kalo semisal ada tanda-tanda bencana dan kita bisa lakukan

pencegahan sendiri. Kalo masalah peta risiko bencana saya belum pernah liat secara langsung tapi sudah tau kalo BPBD itu punya.”

Berikut akan dijelaskan mengenai hasil dari program mitigasi bencana yang dirasakan oleh masyarakat:

3.3.1.1. Hasil Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Hasil yang diharapkan dari program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana oleh BPBD Banjarnegara adalah masyarakat menyadari bahwa daerah atau lingkungan yang mereka tinggali adalah daerah yang memiliki potensi bencana tanah longsor cukup tinggi, yang kedua adalah BPBD Banjarnegara berharap agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor dapat mendeteksi pergerakan tanah, selanjutnya BPBD Banjarnegara berharap agar ketika masyarakat mampu mendeteksi pergerakan tanah maka masyarakat mampu melakukan evakuasi dini secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari petugas dalam hal ini adalah BPBD Banjarnegara. Dan dari ketiga tujuan program diatas hampir terlaksanakan dengan baik.

Pasalnya ada beberapa masyarakat yang menyadari bahwa lingkungan disekitar dia atau bahkan lingkungan yang dia tinggali adalah lingkungan yang memiliki potensi bencana tanah longsor cukup tinggi. Selanjutnya sudah ada beberapa masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana tanah longsor mampu mendeteksi pergerakan tanah bahkan sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan evakuasi secara mandiri dan saling membantu dalam melakukan evakuasi mandiri. Dalam hasil jumlah

yang telah disosialisasi oleh BPBD Banjarnegara sampai tahun 2018 adalah sebanyak 41 Desa dengan 40 desa memiliki ancaman bencana tanah longsor dan 1 desa memiliki ancaman banjir.

Hasil dari program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana sudah cukup untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor, karena dari tujuan yang diberikan oleh BPBD Banjarnegara hampir semuanya tercapai, ditambah dengan adanya dukungan masyarakat yang memberikan respon bagus, cukup dalam artian masyarakat sudah cukup tahu mengenai bencana tanah longsor dengan segala risiko-risiko serta bahayanya bencana tanah longsor, BPBD Banjarnegara menganggap dalam setiap sosialisasi memberikan hal yang maksimal agar informasi yang diberikan dapat masuk kepada masyarakat dan masyarakat dianggap mampu untuk memimplementasikan ilmu yang telah diberikan BPBD Banjarnegara kepada masyarakat.

3.3.1.2. Hasil Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Dalam menjalankan program ini BPBD Banjarnegara memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat dalam sebuah desa mengenai risiko bencana tanah longsor, selain itu pembentukan desa tangguh bencana juga bertujuan untuk melatih ketangguhan sebuah desa dalam melakukan pencegahan kejadian bencana tanah longsor dan dapat melakukan evakuasi secara bersama-sama, tujuan dibentuknya desa tangguh bencana juga untuk membantu BPBD Banjarnegara dalam melakukan program mitigasi bencana.

Dari tujuan diatas ketercapaian hasil implentasi pada tahap baik karena sudah ada beberapa desa yang telah disosialisasi dan terjadi bencana, mereka mencoba untuk mempraktekan apa yang telah diberikan oleh BPBD Banjarnegara. Hasil dari jumlah desa yang telah dinyatakan sebagai desa tangguh bencana oleh BPBD Banjarnegara adalah sebanyak 39 desa dengan potensi ancamannya adalah bencana tanah longsor.

Pembentukan desa bencana dirasa cukup bagus dalam upaya untuk mengurangi dampak dari bencana tanah longsor, pembentukan desa tangguh bencana juga telah mampu menjadi contoh bagi desa lain yang ingin menjadi desa tangguh bencana, bahkan BPBD Banjarnegara sering dibantu oleh desa yang telah mengikuti program pembuatan desa tangguh bencana untuk ikut dalam pembentukan desa tangguh bencana di desa lainnya. Hal ini dianggap mampu memudahkan kinerja BPBD Banjarnegara dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana tanah longsor.

3.3.1.3. Hasil Penyusunan Peta Risiko bencana

Tujuan dari penyusunan peta risiko bencana dalah untuk memudahkan BPBD Banjarnegara dalam mencari mengamati daerah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi. Dengan adanya peta risiko bencana BPBD Banjarnegara mampu mencari dengan cepat daerah-daerah mana saja di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Hasil dari pembuatan petas risiko bencana dari segi jumlah sampai tahun 2018 BPBD Banjarnegara memiliki peta risiko bencana sebanyak 14 peta dengan risiko bencana adalah bencana tanah longsor. Hasil lain dari

pembuatan peta risiko bencana adalah memudahkan BPBD Banjarnegara dalam menentukan program mitigasi tanah longsor yang sesuai dengan kondisi alam dan jenis lempengannya.

Hasil dari penyusunan risiko daerah rawan bencana mampu membantu BPBD Banjarnegara dalam mengawasi dan memantau pergerakan tanah dalam suatu daerah, melalui peta risiko bencana juga BPBD Banjarnegara dapat menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Hasil dari kegiatan ini juga mampu mempermudah masyarakat untuk mengetahui daerah tinggalnya apakah berada pada daerah rawan bencana. Peta risiko bencana juga dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur, karena petunjuk dari peta risiko bencana dapat membuat pemerintah untuk memberi perlakuan kepada daerah tersebut.

3.3.2. Alternatif Program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara

BPBD Banjarnegara selalu melakukan evaluasi dalam menjalankan program baik saat program berjalan sukses maupun saat program berjalan tidak sesuai rencana. Karena evaluasi dianggap mampu memberikan masukan untuk program yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara mengoreksi program yang sudah berjalan dan mengukur program yang sudah berjalan. Didalam evaluasi juga terkadang BPBD Banjarnegara membahas mengenai alternatif-alternatif pilihan program agar program yang dimiliki bisa memberikan manfaat yang baik secara maksimal. Alternatif-

alternatif program yang dimiliki BPBD Banjarnegara tentunya dibuat untuk dapat menggantikan program yang direncanakan namun berjalan tidak sesuai rencana. Sejauh ini alternatif-alternatif yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara adalah melakukan penyederhanaan proses pembebasan lahan relokasi dan penyederhanaan prosedur bantuan sosial untuk korban bencana.

Program mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dirasa sudah cukup untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. Namun masih harus melakukan pembenahan dalam bidang pemantauan hasil, pemantauan hasil dapat berguna sebagai indikator penilaian ketercapaian program mitigasi bencana BPBD Banjarnegara. Selanjutnya adalah mengenai alternatif-alternatif yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara sebagai upaya untuk jalan untuk membantu memudahkan BPBD Banjarnegara dalam menjalankan program mitigasi bencana harus lebih ditailkan lagi, agar alternatif-alternatif tersebut dapat benar-benar membantu kelancaran program mitigasi bencana yang dimiliki dan dilakukan oleh BPBD Banjarnegara.

3.4. Kesamarataan

3.4.1. Manfaat yang Dirasakan Oleh Semua Pihak

Program mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara didisain agar dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana yang dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana saja yang melibatkan semua elemen masyarakat, kegiatan pembentukan desa tangguh bencana juga

melibatkan semua elemen masyarakat didesa tersebut bahkan elemen-elemen instansi lainnyapun diikut sertakan dalam program tersebut.

Tidak hanya melibatkan masyarakat saja, kegiatan sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana juga melibatkan beberapa sekolah melalui program sekolah kebencanaan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Sekolah yang pernah disambangi oleh BPBD Banjarnegara untuk melakukan program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana adalah SMKN 1 Wanayasa pada tahun 2017, SLBN Banjarnegara pada tahun 2017, dan SMKN 1 Pejawaran pada tahun 2018.

Bukan hanya itu, instansi yang setara dengan BPBD Banjarnegara juga ikut merasakan dampaknya. Melalui kerja sama dan kordinasi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dengan instansi terkait seperti dinsos, SAR, dan PMI, namun porsinya yang berbeda. Masyarakat dijadikan sebagai peserta sosialisasi tetapi instansi-instansi terkait dijadikan sebagai media yang membantu kegiatan sosialisainya. Seperti contoh dalam sebuah sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor biasanya BPBD Banjarnegara dan SAR akan mengambil porsi sebagai agen yang mengevakuasi korban, dinsos dijadikan sebagai media untuk membantu pembuatan dapur umum dan masalah kebutuhan sandang,pangan, papan korban tanah longsor, dan PMI dijadikan sebagai media untuk mengurus kesehatan serta obat-obatan yang dibutuhkan korban.

Berbeda dengan program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana serta prmbentukan desa tangguh bencana, kegiatan pembuatan peta risiko bencana hanya melibatkan antara BPBD Banjarnegara dan team pembuat peta

risiko bencana hal ini disebabkan karena pembuatan peta risiko bencana tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, perlu keahlian khusus dan dikerjakan oleh tenaga profesional

3.4.2. Cara Penyampaian Informasi

BPBD Banjarnegara terus berupaya mensosialisasikan program mitigasi bencana dan mencoba untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana. Berbagai cara dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana tanah longsor baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan simulasi, memberikan informasi melalui media social yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara. Tidak itu saja BPBD Banjarnegara juga berupaya untuk menyadarkan masyarakat melalui poster-poster yang disebar di daerah rawan bencana tanah longsor. Ditemui dalam wawancara saudara Septian Wahyu Widodo salah seorang warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Februari di Alun-Alun Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa

“Akses informasi yang diberikan oleh BPBD Banjarnegara sudah cukup bagus. Bisa dihubungi nomor kantor selama jam kantor, pegawai dalam memberikan informasi seputar program juga ramah. Tapi website BPBD Banjarnegara kurang uptodate karena saya pernah liat ada beberapa data yang tidak bisa diakses melalui ponsel dan harus pake laptop”

BPBD Banjarnegara memiliki akun website yang dapat digunakan sebagai informa terpercaya. Web BPBD Banjarnegara menyajikan informasi mengenai gambaran umum BPBD Banjarnegara, alur pelaporan kejadian dan resiko

bencana, serta dalam website resmi BPBD Banjarnegara juga menyertakan alamat kantor yang dapat dikunjungi saat jam kerja dan menyertakan juga nomor telephone yang dapat dihubungi saat masyarakat membutuhkan bantuan BPBD Banjarnegara

BPBD Banjarnegara dalam memberikan pelayanan mengenai bencana tanah longsor berusaha agar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara BPBD Banjarnegara dalam memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai bencana tanah longsor. Apabila dilihat maka BPBD Banjarnegara sudah cukup samarata dalam menjalankan program. Namun alangkah lebih indahnya apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kemudian dalam pembuatan poster ataupun spanduk tentang mitigasi bencana tanah longsor dapat juga dilakukan di daerah yang tidak beresiko bencana tanah longsor agar dapat saling meningkatkan dan menjaga. Website resmi BPBD Banjarnegara perlu mengalami pembaharuan karena informasi-informasi yang seharusnya dapat meringankan beban kerja BPBD Banjarnegara belum semua tercantum. Beberapa dokumen tersebut adalah rencana strategis dan laporan kerja instansi pemerintah.

3.5. Responsivitas

3.5.1. Tanggapan masyarakat

BPBD Banjarnegara selalu mengharapkan tanggapan atau timbal balik yang diberikan oleh masyarakat agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara menyambut dengan baik seluruh program

mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara. Hal ini didukung dengan adanya hasil dari survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan program yang dilakukan BPBD Banjarnegara. Ditemui di Kantor BPBD Banjarnegara Ibu Umi Fatmah, S.Sos selaku kepala Sekretaris BPBD Banjarnegara pada tanggal 6 Februari 2019 menerangkan bahwa:

“Sejauh ini untuk tanggapan masyarakat mengenai program mitigasi bencana khususnya tanah longsor sudah cukup baik. Setiap mereka dimintai untuk mengisi lembar survei mereka isi dengan baik. Bahkan ada beberapa dari mereka yang setelah mengisi langsung mengucapkan terimakasih secara langsung.”

Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam pelayanan program yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara khususnya di dalam pelayanan program mitigasi bencana tanah longsor. Dari hasil survei tersebut BPBD Banjarnegara mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Survei Kepuasan Pelayanan BPBD Banjarnegara

| No | Usur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Kinenerja Unsur Pelayanan | Bobot | (3)*(5) |
|----|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 3,175 | Baik | 0,111 | 0,352 |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3,088 | Baik | 0,111 | 0,343 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3,175 | Baik | 0,111 | 0,352 |
| 4 | Sasaran | 3,088 | Baik | 0,111 | 0,343 |
| 5 | Produk Layanan | 3,088 | Baik | 0,111 | 0,343 |
| 6 | Kompetensi Pelayanan | 3,413 | Baik | 0,111 | 0,379 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,438 | Baik | 0,111 | 0,382 |
| 8 | Penanganan, | 3,463 | Baik | 0,111 | 0,384 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|--------|
| | Pengaduan, Saran dan Masukan | | | | |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3,413 | Baik | 0,111 | 0,379 |
| Nilai Indeks | | | | | 3,256 |
| Nilai SKM | | | | | 81,412 |
| Mutu Pelayanan | | | | | B |
| Kinerja Unit Pelayanan | | | | | Baik |

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

Dari data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kepuasannya masyarakat terhadap pelayanan BPBD Banjarnegara terletak pada penanganan, pengaduan, saran dan masukan dengan total nilai sebesar 3,463 dan nilai kepuasan masyarakat terendah ada pada penilaiannya mengenai prosedur pelayanan, sasaran, dan produk layanan dengan nilai masing-masing yang didapatkan dari indikator ini adalah 3,088.

Setelah itu nilai indeks yang dimiliki yang didapatkan oleh BPBD Banjarnegara sebesar 3,356 dengan nilai SKM sebesar 81,412 dan mendapatkan kategori Baik. Jadi masyarakat menilai bahwa pelayanan dan program yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara sudah baik.

3.5.2. Upaya untuk menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana

Program upaya-upaya lain yang dapat menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana milik BPBD Banjarnegara sebagai cara BPBD Banjarnegara untuk dapat mempertahankan hasil dari program mitigasi bencana yang ada. Program-program yang sudah terlaksana nampaknya harus selalu dipantau perkembangan serta dampaknya, hal ini dijadikan sebagai upaya BPBD

Banjarnegara untuk menjaga konsistensinya dalam menjalankan program mitigasi bencana tanah longsor. Upaya menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana juga dijadikan sebagai cara untuk BPBD Banjarnegara terus melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan mitigasi bencana.

3.5.2.1. Upaya Pada Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Kegiatan upaya yang digunakan sebagai menjaga hasil ataupun dampak dari sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana adalah melakukan pengecekan daerah rawan bencana untuk kemudian dilihat perkembangannya apakah ada perbedaan setelah dilakukan sosialisasi dan pengkajian. Selain itu upaya tindak lanjut juga dilakukan oleh BPBD Banjarnegara apabila ketika dicek dan dipantau daerah tersebut malah semakin parah atau semakin berisiko bencana maka akan dilakukan penutupan lahan dan perawatan lahan serta akan dipasang rambu rawan tanah longsor.

3.5.2.2. Upaya Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pengupayaan-pengupayaan menjaga kekonsistensian desa dalam rangka desa tangguh bencana sangatlah penting. Sebab apabila sebuah desa konsisten dalam menjalankan program desa tangguh bencana maka desa tersebut akan semakin mampu untuk meminimalisir potensi bencana yang ada atau bahkan desa tersebut akan semakin kuat dalam melawan risiko bencana tanah longsor. Upaya-upaya yang dilakukan BPBD Banjarnegara untuk menjaga konsistensi desa tangguh bencana dengan

cara melakukan pengecekan dan kunjungan melihat keadaan terkini desa tersebut. Kunjungan ini biasanya dilakukan untuk mengecek potensi bencana apakah semakin berkurang atau malah semakin bertambah.

3.5.2.3. Upaya dalam Pembuatan Peta Risiko Bencana

Sama dengan program-program sebelumnya, program pembuatan peta risiko bencana juga memerlukan upaya untuk mensukseskan dalam keberhasilan program. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD Banjarnegara adalah selalu memantau perkembangan daerah yang telah dibuat peta risiko bencana lalu kemudian memperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi terkini kedalam sebuah peta risiko bencana yang baru. Hal ini dijadikan sebagai upaya BPBD Banjarnegara dalam memantau perkembangan daerah yang berisiko mengalami bencana tanah longsor.

3.5.3. Kegiatan pendukung mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat

BPBD Banjarnegara setelah melakukan sosialisasi dan simulasi juga ikut dalam pengawasan pemantauan daerah rawan bencana. Dalam melakukan pemantauan BPBD Banjarnegara tidak mampu melakukannya sendiri melainkan melibatkan masyarakat sekitar untuk memantau. Setiap hasil yang didapat setelah melakukan pemantau selalu dievaluasi. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi bahan untuk menentukan BPBD Banjarnegara dengan masyarakat sekitar untuk menentukan jalan selanjutnya.

Dalam hal responsivitas, BPBD Banjarnegara mencoba untuk menjadi lembaga yang responsible kepada keinginan masyarakat. Hal ini dibuktikan

dengan adanya survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara kepada masyarakat. Hasil survei tersebut dianggap mampu memberikan hasil dari pendapat masyarakat terhadap kepuasan pelayanan BPBD Banjarnegara. Bukan hanya itu upaya yang dilakukan BPBD Banjarnegara untuk mensukseskan acara juga dapat dibilang cukup baik karena selain menjalankan program BPBD Banjarnegara juga memantau hasil dari program. Kemudian kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk hasil dari program mitigasi bencana dirasa mampu membantu BPBD Banjarnegara dalam menjaga hasil dari mitigasi bencana itu sendiri.

3.6. Ketepatan

3.6.1. Penilaian Masyarakat terhadap Program Mitigasi Bencana

Dalam menjalankan upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana, BPBD Banjarnegara selalu melakukan evaluasi baik secara internal bersama dengan elemen di dalam BPBD atau evaluasi bersama masyarakat. Bahan evaluasi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara berasal dari hasil program dan masukan serta penilaian masyarakat itu sendiri. Sejauh ini untuk ketiga program mitigasi yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara masyarakat Kabupaten Banjarnegara menilai sudah cukup baik, hal ini didasarkan pada survei kepuasan pelayanan BPBD Banjarnegara. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Andri Sulistyono selaku kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan yang menerangkan bahwa:

“sejauh ini respon yang diberikan oleh masyarakat mengenai program mitigasi cukup baik, baik desa yang sudah dilakukan program mitigasi ataupun

desa yang belum sempat dilakukan program mitigasi. Bahkan ada beberapa warga yang meminta program tersebut untuk dijalankan di desanya”

BPBD Banjarnegara dalam menerima tanggapan masyarakat selalu terbuka untuk siapa saja apabila ingin memberikan saran, kritikan, dan masukan. Masyarakat bebas memberikan masukan saran dan kritik kepada BPBD Banjarnegara kapan saja dan dimana saja serta melalui apa saja. Boleh melalui pesan singkat, datang langsung ke kantor BPBD Banjarnegara atau melalui media sosial. Selain menyampaikan saran dan masukan, masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan keluhan atas kondisi alam yang diperkirakan dapat memicu bencana alam kepada BPBD Banjarnegara kapan saja dan melalui apa saja.

3.6.2. Penilaian BPBD Banjarnegara terhadap program mitigasi

Dalam menjalankan sebuah program biasanya instansi-instansi pemerintahan harus mampu menilai hasil dari pada program yang dimiliki, hal ini dijadikan sebagai bahan koreksi internal untuk kemudian apa yang masih belum baik dapat diperbaiki ditahun berikutnya. Penilaian ini juga dilakukan oleh BPBD Banjarnegara, menurut sumber data yaitu Lembar Kinerja Instansi Pemerintahan BPBD Banjarnegara tahun 2018 menyatakan bahwa program mitigasi geologi yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara sudah cukup efisien, hal ini disebabkan angka ketercapaian program baik dinilai dari realisasi anggaran maupun realisasi fisik sudah efisien. Data menerangkan bahwa pada program pembentukan desa tangguh bencana untuk indikator realisasi fisik mendapatkan angka 100% dari target 100% dan untuk realisasi anggaran adalah 99% dari 100% dengan keterangan terdapat efisiensi dalam biaya makan dan minum. Yang kedua

adalah program sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana dengan nilai realisasi fisik sebesar 100% sari 100% dan realisasi anggaran sebesar 97% dari target 100% dengan keterangan terdapat efisiensi perjalanan dinas dalam daerah. Yang terakhir adalah pembuatan peta resiko bencana dalam realisasi fisik mendapatkan 100% dari target 100% dan realisasi anggaran mencapai 98% dari target 100% dengan keterangan terdapat efisiensi jasa pihak penyedia jasa.

Dari penjelasan kedua indikator diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan program mitigasi bencana BPBD Banjarnegara memenuhi kategori ketepatangunaan, sebaba dalam kedua indikator BPBD Banjarnegara sudah cukup baik untuk menjalankannya.